



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JL. R.W. Monginsidi No. 69 Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35211
Telp. (0721) 481166 Fax. (0721) 481166
Laman : <http://www.lampungprov.go.id> Pos-el : setda@lampungprov.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/2902/VI.04/2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka pengisian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, bersama ini Pemerintah Provinsi Lampung memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 Hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024;
11. Surat edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

B. PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN

No.	Jenis Kebutuhan	Alokasi Kebutuhan	
		Tenaga Teknis	Tenaga Kesehatan
1	Kebutuhan Umum	444	98
2	Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas	12	0
Jumlah		456	98

Untuk rincian Jenis Jabatan, Unit Penempatan, Alokasi Kebutuhan Umum dan Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas dapat dilihat pada **Lampiran** pengumuman ini.

C. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Usia paling rendah **18 (delapan belas)** tahun dan paling tinggi **35 (tiga puluh lima)** tahun pada saat melamar.
3. Jabatan yang dapat dilamar dengan batas usia pelamar paling tinggi **40 (empat puluh)** tahun pada saat melamar, yakni pada jabatan dan kualifikasi pendidikan Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
6. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
9. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
12. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

13. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
14. Informasi akreditasi program studi/perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 12 dapat diperoleh dari:
 - a. pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; atau
 - b. pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
15. Pelamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar yang **masih berlaku pada saat pendaftaran**, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR), kecuali pada jabatan tersebut dibawah ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024, yakni :
 - a. Epidemiolog Kesehatan Ahli
 - b. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli
 - c. Perekam Medis Ahli
 - d. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli
 - e. Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli
 - f. Administrator Kesehatan Ahli
 - g. Entomolog Kesehatan Ahli
16. Membuat surat lamaran yang memuat jabatan yang dilamar dan ditujukan kepada Pj. Gubernur Lampung Cq. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **e-meterai (meterai elektronik)** yang masih baru serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Membuat surat pernyataan 5 (lima) poin dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **e-meterai (meterai elektronik)** yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Pelamar tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya.
19. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pada proses seleksi administrasi maupun pada saat pemberkasan, pengusulan, dan penetapan Nomor Induk Pegawai, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.
20. Bagi pelamar yang berstatus PPPK wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang berwenang (Pyb) pada saat pelamaran.
21. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan di Tahun Anggaran yang sama pada kebutuhan CPNS dan/atau PPPK, jika diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan CPNS dan/ atau PPPK atau menggunakan 2 (dua) NIK yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. KRITERIA PELAMAR

1. **Pelamar Umum** adalah semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkeinginan dan memenuhi syarat sesuai peraturan (formasi, jabatan, dan lain-lain) selama batas usia yang dipersyaratkan terpenuhi.
2. **Pelamar berstatus PPPK** adalah pelamar yang berstatus sebagai PPPK aktif yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi syarat sesuai peraturan (formasi, jabatan, masa perjanjian kerja minimal 1 tahun, telah mendapat persetujuan dari PPK atau Pyb dan persyaratan lainnya) selama batas usia yang dipersyaratkan terpenuhi.

3. **Pelamar Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir dengan ketentuan mampu melakukan tugas sesuai dengan tugas jabatan yang dilamar.

Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:

- a. Melampirkan dokumen/surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
- b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- c. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - 2) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dengan mengunggah/mengupload:
 - a) dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

E. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara *online* dari tanggal **20 Agustus** s.d **6 September 2024** melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan alur sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun dengan cara:
 - a. Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga (KK);
 - b. Isi biodata dan kolom lainnya;

- c. Unggah pasfoto dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 dalam format **jpg/pdf**;
- d. Cetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar log in ke **<https://sscasn.bkn.go.id>** dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
 3. Pelamar melengkapi data diri;
 4. Pelamar memilih **Instansi Pemerintah Provinsi Lampung** dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
 5. Pelamar mengunggah dokumen sesuai dengan dokumen aslinya dalam bentuk **jpg/pdf**, yaitu :

NO.	DOKUMEN	PENJELASAN	KET.
1.	Scan Pasfoto terbaru dengan pakaian formal berlatar belakang berwarna merah	Pas foto berlatar belakang warna merah, memakai pakaian formal (bukan kaos/t-shirt)	Wajib
2.	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)/ Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan dari Dukcapil/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya dari Dukcapil	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Atau ➤ Asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Kecamatan. 	Wajib
3.	Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat pernyataan ditempel e-meterai dan ditandatangani. ➤ Contoh format Surat Pernyataan sebagaimana pada lampiran pengumuman ini 	Wajib

NO.	DOKUMEN	PENJELASAN	KET.
4.	Surat Lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat lamaran memuat jabatan yang dilamar ditujukan kepada Pj. Gubernur Lampung Cq. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PNS Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan ditandatangani serta wajib menggunakan e-meterai (meterai elektronik) ➤ Contoh format Surat lamaran sebagaimana pada lampiran pengumuman ini 	Wajib
5	Scan Ijazah asli / bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ijazah Asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar. ➤ Bagi pelamar dengan persyaratan ijazah profesi (untuk jabatan Dokter / Dokter Spesialis, Apoteker Ahli Pertama dan sejenisnya) melampirkan asli ijazah S.1 + Ijazah profesi sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar. 	Wajib
6.	Transkrip Nilai asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan	Transkrip Nilai Asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada ijazah	Wajib
7.	Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah	Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah	Wajib

NO.	DOKUMEN	PENJELASAN	KET.
8	Scan Asli Surat Tanda Registrasi (STR)	STR sesuai jenjang pendidikan dan jabatan yang dilamar yang masih berlaku pada saat pendaftaran bagi jabatan tenaga kesehatan yang mempersyaratkan	Wajib
9.	Scan asli Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas	Surat Keterangan tersebut menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya (bagi pelamar yang menyatakan penyandang disabilitas)	Wajib
10.	Video/ link video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar	Video/ link video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar (bagi pelamar yang menyatakan penyandang disabilitas)	Wajib

6. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca, karena kesalahan dalam mengunggah dokumen mengakibatkan pelamar **tidak lulus seleksi administrasi**;
7. Jika terdapat persyaratan yang memiliki **lebih dari 1 (satu) dokumen**, maka dokumen tersebut digabungkan menjadi **1 (satu) file dengan format pdf**.
8. Simpan data yang telah dicek pada "*form Resume*" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar;
9. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2024 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran; dan
10. Petunjuk/Panduan Pendaftaran bagi Calon Pendaftar dapat diunduh/ *download* pada portal **<https://sscasn.bkn.go.id>**.

F. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi Administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;

- b. Seleksi administrasi untuk kebutuhan PNS dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
- c. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
- d. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, berhak melakukan sanggahan atas hasil seleksi administrasi; dan
- e. Pelamar yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

2. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

- a. Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui website resmi Pemerintah Provinsi Lampung di <https://www.lampungprov.go.id/> dan website resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di <https://bkd.lampungprov.go.id/>;
- b. Sebelum pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, jika Panitia Seleksi Pemerintah Provinsi Lampung memerlukan verifikasi tatap muka bagi pelamar penyandang disabilitas, maka calon peserta akan dijadwalkan untuk hadir di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

3. Masa Sanggah Seleksi Administrasi

- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN sesuai dengan jadwal masa sanggah;
- b. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal **kesalahan bukan berasal dari pelamar**; dan
- c. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi.

4. Lokasi Ujian

Lokasi ujian akan ditentukan kemudian dan diinformasikan melalui website resmi Pemerintah Provinsi Lampung di <https://www.lampungprov.go.id/> dan website resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di <https://bkd.lampungprov.go.id/>;

5. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Seleksi

NO	KEGIATAN	JADWAL *)
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL *)
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

***) Tahapan Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.**

G. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelamar atau Peserta Seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS), **tidak dipungut biaya.**
2. Pendaftaran dilakukan pada masa pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).
3. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah.
4. Segala bentuk persyaratan yang ada pada aplikasi SSCASN di luar pengumuman ini, menjadi **persyaratan wajib** yang harus dipenuhi oleh pelamar.
5. Informasi pengecekan keaslian meterai elektronik (e-meterai) dapat melalui laman **<https://verification.peruri.co.id>**.
6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
7. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/ PNS, panitia seleksi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/ PNS.

8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman hasil seleksi, diketahui terdapat keterangan maupun berkas/dokumen Peserta yang tidak **sesuai/tidak benar** dan menyalahi ketentuan yang berlaku, maka Panitia Seleksi dapat **MENGGUGURKAN** kelulusan yang bersangkutan.
9. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan pegawai ASN selanjutnya.
10. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi dan apabila diketahui serta dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan **DIGUGURKAN/DIBERHENTIKAN** dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
11. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi, diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Lampung dan **tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi** paling singkat selama **10 (sepuluh)** tahun sejak diangkat sebagai PNS.
12. Dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif berkenaan dengan dokumen persyaratan seleksi, dapat menghubungi **Call Center** Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di **0852-6868-9606 (hanya menerima pesan Telegram)** atau melalui email Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di **bkd.pengadaanasn@gmail.com**.
13. Keputusan panitia seleksi Pemerintah Provinsi Lampung, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,

FAHRIZAL DARMINTO



Lampiran : Lampiran Pengumuman Seleksi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024
Nomor : 800.1.2.2 /2902/V1.04/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI FORMASI	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	2	3	4	5	6	7
A	TENAGA KESEHATAN		98	98	0	
1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN
2	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
3	APOTEKER AHLI PERTAMA	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA
4	APOTEKER AHLI PERTAMA	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN UPTD INSTALASI FARMASI DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN UPTD INSTALASI FARMASI DAN KALIBRASI ALKES JABATAN FUNGSIONAL
5	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA

1	2	3	4	5	6	7
6	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN UPTD INSTALASI FARMASI DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN UPTD INSTALASI FARMASI DAN KALIBRASI ALKES JABATAN FUNGSIONAL
7	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
8	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL JF DOKTER
9	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA
10	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
11	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL JF DOKTER
12	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK

1	2	3	4	5	6	7
13	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
14	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
15	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA
16	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
17	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA
18	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL JF DOKTER
19	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK

1	2	3	4	5	6	7
20	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL JF DOKTER
21	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN NUKLIR DAN TERANOSTIK MOLEKULER	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
22	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
23	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
24	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
25	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
26	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK

1	2	3	4	5	6	7
27	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PARASITOLOGI KLINIK	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
28	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
29	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
30	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL JF DOKTER
31	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
32	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA
33	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK

1	2	3	4	5	6	7
34	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
35	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA
36	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
37	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA
38	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
39	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
40	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK

1	2	3	4	5	6	7
41	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	8	8	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
42	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
43	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK (PEDODONTIK)	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
44	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS PENYAKIT MULUT	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
45	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
46	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
47	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7
48	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN
49	NUTRISIONIS TERAMPIL	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA
50	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL JF OKUPASI TERAPIS
51	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN
52	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL JF PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
53	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA
54	PERAWAT TERAMPIL	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	9	9	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA

1	2	3	4	5	6	7
55	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA
56	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
57	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA
58	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	4	4	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL JF PSIKOLOG KLINIS
59	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA
60	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN UPTD INSTALASI FARMASI DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN UPTD INSTALASI FARMASI DAN KALIBRASI ALKES JABATAN FUNGSIONAL
61	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7
62	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	5	5	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN UPTD INSTALASI FARMASI DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN UPTD INSTALASI FARMASI DAN KALIBRASI ALKES JABATAN FUNGSIONAL
63	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN
64	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT. 01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
B	TENAGA TEKNIS		456	444	12	
1	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING - S-1 PSIKOLOGI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2	ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN AHLI PERTAMA	D-IV OSEANOGRAFI - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM - D-IV ILMU KELAUTAN - D-IV MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN - D-IV PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 OSEANOGRAFI - S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH UPTD Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara
5	ASISTEN PENGAWAS PERIKANAN TERAMPIL	D-III PERIKANAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1	2	3	4	5	6	7
6	ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TERAMPIL	D-III PERIKANAN - D-III PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN - D-III TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - D-III KELAUTAN - D-III TEKNIK PENANGKAPAN IKAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
7	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
8	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH SEKSI PENYIDIKAN
9	KONSELOR SDM	S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING - S-1 PSIKOLOGI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
10	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN	5	5	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
11	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	D-III PARAMEDIK VETERINER - D-III TEKNISI MEDIS VETERINER - D-III KESEHATAN TERNAK - D-III KESEHATAN HEWAN	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
12	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS SOSIAL UPTD PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN BANGSA
13	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS SOSIAL
14	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS SOSIAL UPTD PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
15	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS SOSIAL UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TRESNA WERDHA
16	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS SOSIAL UPTD PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK BUDI ASIH
17	PEMBINA INDUSTRI AHLI PERTAMA	D-IV KIMIA INDUSTRI - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 REKAYASA INDUSTRI - S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1	2	3	4	5	6	7
18	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - D-IV BUDIDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK KELAUTAN - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 BUDIDAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK SISTEM PERKAPALAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PERIKANAN TANGKAP
19	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - D-IV BUDIDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK KELAUTAN - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 BUDIDAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK SISTEM PERKAPALAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTD PELABUHAN PERIKANAN LABUHAN MARINGGAI SEKSI PENGUSAHAAN
20	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - D-IV BUDIDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK KELAUTAN - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 BUDIDAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK SISTEM PERKAPALAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTD PELABUHAN PERIKANAN LABUHAN MARINGGAI SEKSI SARANA DAN PRASARANA
21	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - D-IV BUDIDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK KELAUTAN - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 BUDIDAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK SISTEM PERKAPALAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1	2	3	4	5	6	7
22	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - D-IV BUDIDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK KELAUTAN - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 BUDIDAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK SISTEM PERKAPALAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTD PELABUHAN PERIKANAN LEMPASING SEKSI PENGUSAHAAN
23	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - D-IV BUDIDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK KELAUTAN - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 BUDIDAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK SISTEM PERKAPALAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTD PELABUHAN PERIKANAN KALIANDA SEKSI PENGUSAHAAN
24	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - D-IV BUDIDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK KELAUTAN - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 BUDIDAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK SISTEM PERKAPALAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTD BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU SEKSI PELAYANAN DAN PENGENDALIAN MUTU PERBENIHAN
25	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - D-IV BUDIDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK KELAUTAN - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 BUDIDAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK SISTEM PERKAPALAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTD PELABUHAN PERIKANAN KOTA AGUNG SEKSI PENGUSAHAAN

1	2	3	4	5	6	7
26	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - D-IV BUDIDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK KELAUTAN - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 BUDIDAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK SISTEM PERKAPALAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN SEKSI PENGEMBANGAN HASIL PERIKANAN
27	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - D-IV BUDIDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK KELAUTAN - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 BUDIDAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN - D-IV TEKNIK SISTEM PERKAPALAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTD PELABUHAN PERIKANAN KALIANDA SEKSI SARANA DAN PRASARANA
28	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Biro Kesejahteraan Rakyat
29	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK
30	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA
31	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK

1	2	3	4	5	6	7
32	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
33	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
34	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
35	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH Bagian Kerjasama, Pejabat Negara dan Legislatif
36	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT
37	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
38	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI (KPHK) TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN SUB BAGIAN TATA USAHA

1	2	3	4	5	6	7
39	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH Asisten Administrasi Umum BIRO UMUM Bagian Tata Usaha
40	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
41	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
42	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan Seksi Pengelolaan Data, Infrastruktur dan Jaringan
43	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH Asisten Administrasi Umum BIRO UMUM Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli

1	2	3	4	5	6	7
44	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
45	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI
46	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
47	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
48	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gunung Balak Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7
49	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH Asisten Administrasi Umum Biro Administrasi Pimpinan Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan
50	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL
51	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERKEBUNAN UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN SEKSI DATA DAN KELEMBAGAAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
52	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3
53	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SUB BAGIAN TATA USAHA

1	2	3	4	5	6	7
54	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
55	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERHUBUNGAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
56	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BIDANG KETENAGALISTRIKAN
57	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERKEBUNAN UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU BENIH SEKSI PENGAWASAN
58	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SEKRETARIAT

1	2	3	4	5	6	7
59	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN PENDIDIKAN KHUSUS (DIKSUS)
60	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH UPTD Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Sub Bagian Tata Usaha
61	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG TATA LINGKUNGAN
62	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
63	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD MUSEUM KETRANSMIGRASIAN Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7
64	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF UPTD PENGELOLAAN OBJEK WISATA SEKSI PELAYANAN
65	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI Bidang Bina Konstruksi
66	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Agung Utara Sub Bagian Tata Usaha
67	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI BIDANG KETRANSMIGRASIAN
68	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH Asisten Administrasi Umum BIRO ORGANISASI Bagian Tatalaksana SUB BAGIAN TATA USAHA

1	2	3	4	5	6	7
69	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
70	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
71	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIDANG KEBUDAYAAN
72	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SEKSI PENGAWASAN
73	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I SEKSI JALAN

1	2	3	4	5	6	7
74	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
75	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA UPTD PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT OLAHRAGA SEKSI TEKNIS
76	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan Seksi Sistem Informasi Keuangan
77	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERKEBUNAN UPTD BALAI BENIH DAN KEBUN INDUK SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA
78	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

1	2	3	4	5	6	7
79	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) PESAWARAN SUB BAGIAN TATA USAHA
80	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SEKRETARIAT
81	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	1	1	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI SEKRETARIAT
82	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Bidang Layanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelestarian dan Kerjasama
83	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN PENDIDIKAN KHUSUS (DIKSUS)

1	2	3	4	5	6	7
84	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BATU SERAMPOK SUB BAGIAN TATA USAHA
85	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS INTI
86	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedung Wani Sub Bagian Tata Usaha
87	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	1	1	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
88	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI Bidang Bina Program

1	2	3	4	5	6	7
89	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN BIDANG PENGELOLAAN ARSIP
90	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Biro Kesejahteraan Rakyat Sub Bagian Tata Usaha
91	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
92	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	1	1	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT
93	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

1	2	3	4	5	6	7
94	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD MUSEUM NEGERI LAMPUNG Seksi Teknis
95	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	1	1	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT
96	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD MUSEUM KETRANSMIGRASIAN Seksi Teknis
97	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
98	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB BAGIAN TATA USAHA

1	2	3	4	5	6	7
99	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	1	1	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
100	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG DATA GENDER DAN ANAK, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
101	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH UPTD Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Seksi Penilaian Kompetensi
102	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS TENAGA KERJA UPTD BALAI LATIHAN KERJA METRO SUB BAGIAN TATA USAHA
103	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN

1	2	3	4	5	6	7
104	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
105	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
106	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur Sub Bagian Tata Usaha
107	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERKEBUNAN BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
108	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERKEBUNAN SEKRETARIAT

1	2	3	4	5	6	7
109	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERKEBUNAN BIDANG KELEMBAGAAN USAHA DAN PENYULUHAN
110	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH SEKRETARIAT
111	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SEKSI TINDAK LANJUT
112	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD MUSEUM NEGERI LAMPUNG SUB BAGIAN TATA USAHA
113	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

1	2	3	4	5	6	7
114	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD MUSEUM NEGERI LAMPUNG Seksi Pelayanan
115	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT
116	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
117	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
118	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS TENAGA KERJA UPTD BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH SEKSI PEMASARAN DAN KERJASAMA

1	2	3	4	5	6	7
119	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BIDANG PENGUATAN INOVASI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS DAERAH
120	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
121	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	1	1	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT
122	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN PENDIDIKAN KHUSUS (DIKSUS)
123	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKSI PENGELOLAAN OPT DAN DPI

1	2	3	4	5	6	7
124	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT
125	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II SUB BAGIAN TATA USAHA
126	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUB BAGIAN TATA USAHA
127	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pematang Neba Sub Bagian Tata Usaha
128	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS TENAGA KERJA UPTD BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SEKSI PROMOSI DAN PELATIHAN

1	2	3	4	5	6	7
129	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN SUB BAGIAN TATA USAHA
130	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	1	1	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKRETARIAT
131	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT PROVINSI SEKRETARIAT
132	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI SUB BAGIAN TATA USAHA
133	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	2	1	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SEKRETARIAT

1	2	3	4	5	6	7
134	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKSI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN
135	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
136	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	1	1	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT
137	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG PENYAJIAN DATA DAN KEPANGKATAN
138	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS TENAGA KERJA UPTD BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH SUB BAGIAN TATA USAHA

1	2	3	4	5	6	7
139	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA UPTD PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT OLAHRAGA SEKSI PELAYANAN
140	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SUB BAGIAN TATA USAHA
141	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN
142	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
143	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN SUB BAGIAN TATA USAHA

1	2	3	4	5	6	7
144	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
145	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM DAN FUNGSIONAL
146	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH SEKRETARIAT
147	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
148	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	1	1	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT

1	2	3	4	5	6	7
149	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN PENDIDIKAN KHUSUS (DIKSUS)
150	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN PENDIDIKAN KHUSUS (DIKSUS)
151	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BIDANG TANAMAN PANGAN
152	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH
153	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERHUBUNGAN BIDANG PENGEMBANGAN TRANSPORTASI

1	2	3	4	5	6	7
154	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA
155	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN PENDIDIKAN KHUSUS (DIKSUS)
156	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS SOSIAL BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
157	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERKEBUNAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA
158	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEKRETARIAT

1	2	3	4	5	6	7
159	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	2	1	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA SEKRETARIAT
160	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII SUB BAGIAN TATA USAHA
161	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BIDANG HORTIKULTURA
162	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN PENDIDIKAN KHUSUS (DIKSUS)
163	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7
164	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Pisang Sub Bagian Tata Usaha
165	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	1	1	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
166	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
167	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
168	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BIDANG MINERAL DAN BATUBARA

1	2	3	4	5	6	7
169	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT
170	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
171	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
172	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERKEBUNAN BIDANG PRODUKSI
173	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Tegi Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7
174	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN
175	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) PESISIR BARAT Sub Bagian Tata Usaha
176	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
177	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD TAMAN BUDAYA SEKSI TEKNIS PENGOLAHAN SENI
178	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERHUBUNGAN BIDANG PEMBINAAN KESELAMATAN TRANSPORTASI

1	2	3	4	5	6	7
179	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
180	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Muara Dua Sub Bagian Tata Usaha
181	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS TENAGA KERJA UPTD BALAI LATIHAN KERJA KALIANDA SUB BAGIAN TATA USAHA
182	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD TAMAN BUDAYA SUB BAGIAN TATA USAHA
183	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA Bidang Perumahan

1	2	3	4	5	6	7
184	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
185	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
186	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI
187	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD TAMAN BUDAYA SEKSI PELAYANAN TEKNIS SENI
188	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) WAY TERUSAN SUB BAGIAN TATA USAHA

1	2	3	4	5	6	7
189	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS SOSIAL SEKRETARIAT
190	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
191	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS SOSIAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL
192	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
193	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Sub Bagian Tata Usaha
194	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS

1	2	3	4	5	6	7
195	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BIDANG ENERGI
196	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
197	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKSI PELAYANAN TEKNIS
198	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan Sub Bagian Tata Usaha
199	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERHUBUNGAN BIDANG TEKNIK SARANA DAN PRASARANA
200	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH Asisten Administrasi Umum BIRO UMUM Bagian Administrasi Keuangan dan Aset

1	2	3	4	5	6	7
201	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUB BAGIAN TATA USAHA
202	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD MUSEUM KETRANSMIGRASIAN SEKSI PELAYANAN
203	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
204	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH Asisten Administrasi Umum Biro Administrasi Pimpinan BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN SUB BAGIAN TATA USAHA
205	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SUB BAGIAN TATA USAHA
206	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II SEKSI JALAN

1	2	3	4	5	6	7
207	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS SOSIAL SEKRETARIAT Sub Bagian Keuangan Dan Aset
208	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI
209	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
210	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
211	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN
212	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS SOSIAL SEKRETARIAT Sub Bagian Umum Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7
213	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS TENAGA KERJA UPTD BALAI LATIHAN KERJA WAY ABUNG SUB BAGIAN TATA USAHA
214	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT
215	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I SUB BAGIAN TATA USAHA
216	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERHUBUNGAN BIDANG PENGEMBANGAN TRANSPORTASI SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) TRANSPORTASI
217	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SEKSI PENGADUAN
218	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH Bagian Kerjasama, Pejabat Negara dan Legislatif

1	2	3	4	5	6	7
219	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH Asisten Administrasi Umum Biro Administrasi Pimpinan BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN
220	PENATA KEPROTOKOLAN	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DPRD BAGIAN FASILITASI ASPIRASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
221	PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG	D-III TEKNIK SIPIL - D-III GEOMATIKA - D-III SURVEI DAN PEMETAAN - D-III PERTANAHAN - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III GEOGRAFI - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III PEMETAAN - D-III PENGUKURAN - D-III PERENCANAAN WILAYAH KOTA	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA BIDANG PENATAAN RUANG PERTANAHAN
222	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	D-IV PETERNAKAN - S-1 ILMU PETERNAKAN - S-1 PRODUKSI PETERNAKAN - S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
223	PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL	D-III BUDIDAYA PETERNAKAN - D-III KESEHATAN HEWAN - D-III PRODUKSI TERNAK - D-III TEKNISI REPRODUKSI SATWA	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
224	PENGAWAS INDUSTRI	D-IV KIMIA INDUSTRI - D-IV TEKNOLOGI BUDI DAYA PERIKANAN /TEKNOLOGI AKUAKULTUR - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMATIKA INDUSTRI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 FISIKA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Bidang Kerja Sama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri

1	2	3	4	5	6	7
225	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGROBISNIS - S-1 AGROEKOTEKNOLOGI - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN - S-1 AGRONOMI - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
226	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGROBISNIS - S-1 AGROEKOTEKNOLOGI - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN - S-1 AGRONOMI - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERKEBUNAN
227	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	D-IV PETERNAKAN - S-1 ILMU PETERNAKAN - S-1 PRODUKSI PETERNAKAN - S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK - S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
228	PENGAWAS PENDATAAN STATISTIK	D-IV ILMU STATISTIK - S-1 KOMPUTASI STATISTIKA	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK
229	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
230	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT - D-IV TEKNOLOGI KESELAMATAN OTOMOTIF - D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT - S-1 ILMU TRANSPORTASI DARAT - S-1 ILMU MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT - S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT - S-1 TRANSPORTASI DARAT	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERHUBUNGAN UPTD TERMINAL SEKSI FASILITAS DAN JASA TERMINAL
231	PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	D-IV AKUAKULTUR - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - D-IV ILMU ATAU SAINS KELAUTAN - D-IV EKONOMI SUMBERDAYA KELAUTAN - S-1 AKUAKULTUR - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 PERIKANAN - S-1 SAINS KELAUTAN - S-1 EKONOMI SUMBERDAYA KELAUTAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
232	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH Asisten Administrasi Umum Biro Administrasi Pimpinan BAGIAN PROTOKOL
233	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D-III SOSIOLOGI PEDESAAN - D-III PEMBANGUNAN SOSIAL - D-III HUBUNGAN MASYARAKAT - D-III TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

1	2	3	4	5	6	7
234	PENGELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
235	PENGELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
236	PENGEMBANG BUKU ELEKTRONIK	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ANIMASI - S-1 PRODUKSI MEDIA	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN BIDANG DEPOSIT, AKUISISI DAN PENGELOLAAN BAHAN PUSTAKA
237	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	6	6	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
238	PENGENDALI KONTEN INTERNET	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI - S-1 ILMU INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
239	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU POLITIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	8	8	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
240	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 SAINS KOMUNIKASI - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 REKAYASA INDUSTRI - S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
241	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS SOSIAL
242	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN - D-III KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN - D-III LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERHUBUNGAN UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SEKSI OPERASIONAL
243	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH Asisten Administrasi Umum BIRO UMUM
244	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH Asisten Administrasi Umum Biro Administrasi Pimpinan

1	2	3	4	5	6	7
245	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
246	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
247	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
248	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI	3	3	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
249	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH Asisten Administrasi Umum BIRO UMUM
250	TEKNISI AKUAKULTUR TERAMPIL	D-III BUDIDAYA PERIKANAN - D-III BUDIDAYA KELAUTAN - D-III PERIKANAN BUDIDAYA - D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN	1	1	0	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TOTAL			554	542	12	

SEKRETARIS DAERAH,

FAHRIZAL DARMINTO

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.